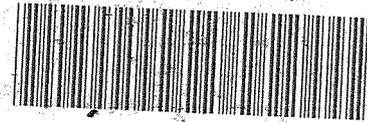


OK

Prosiding Dialog dan Lokakarya

**KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI**



IPB20030031

Editor:

Dr. Hardinsyah

Dr. Yayuk F Baliwati

Ir. Dodik Briawan MCN

Ari Raharjo

Kerjasama:

Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG), IPB

AGRINDO Aneka Consult

Partnership for Economic Growth (PEG), USAID

Pemerintah Kabupaten Bogor

Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian

Cibinong, 2001 .

PT PERPUSTAKAAN IPB

A DARI :

IPB 20030031

: 10/3-2003

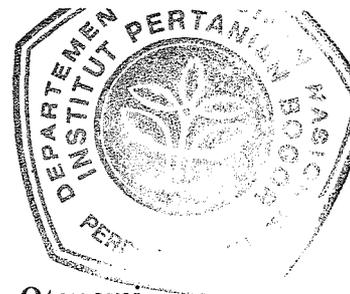
T : P

PELEBIH ✓

SUMBERAN 1

PERMORIAN

PERTUKARAN



Prosiding Dialog dan Lokakarya

Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi

Kerjasama:

PSKPG-IPB, AGRINDO Aneka Consult, PEG-USAID,
PemKab Bogor, BBKP-Departemen Pertanian

Editor:

Dr. Hardinsyah; Dr. Yayuk F. Baliwati
Ir. Dodik Briawan MCN; Ari Raharjo

Setting:

Andi Azhari Lubis

AGRINDO Aneka Consult

Jl. Panji Semirang JM 15, Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading Permai
Jakarta Utara 14240

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program
Ketahanan Pangan di Era Otonomi (2001 : Bogor)
Prosiding Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan
Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi /
editor, Dr. Hardinsyah, Dr. Yayuk F. Baliwati, Ir.
Dodik Briawan MCN, Ari Raharjo. -- Jakarta :

ISBN 979-96742-0-4

RUMUSAN HASIL DIALOG DAN LOKAKARYA KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI ERA OTONOMI

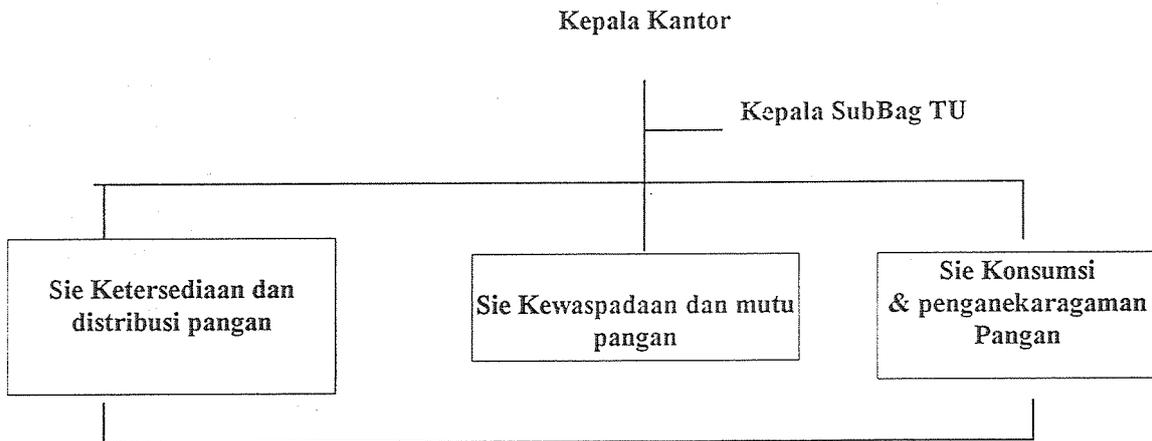
Pada tanggal November 2001 bertempat di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Bogor, telah dilakukan Seminar dan Lokakarya dengan tema Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi oleh Pusat Studi kebijakan Pangan dan Gizi (PSKPG) Institut Pertanian Bogor dan AGRINDO Aneka Consult bekerjasama dengan Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP) Departemen Pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, dan *Partnership for Economic Growth (PEG)* USAID. Seminar yang dihadiri oleh sekitar 220 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur perwakilan kecamatan dan desa, serta unsur swasta yaitu Industri pangan, PKK, LSM peduli ketahanan pangan dan tokoh masyarakat dimaksudkan untuk mendesiminasikan kebijakan dan program nasional ketahanan pangan, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, permasalahan pangan dan gizi di kabupaten Bogor dan pengalaman beberapa daerah dalam mengelola program ketahanan pangan. Lokakarya pada hari kedua dihadiri oleh 104 peserta dari unsur yang sama seperti peserta seminar. Lokakarya ini dimaksudkan untuk mendiskusikan masukan bagi perumusan kebijakan dan program ketahanan pangan daerah dengan pendekatan sistem, khususnya di kabupaten Bogor, yang kemungkinan bisa diadopsi/dimodifikasi bagi Pemda kabupaten lain di Jawa Barat. Rumusan hasil Semiloka ini dipaparkan dengan sistematika pendekatan sitem, yaitu sebagai berikut:

1. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Bogor memerlukan kelembagaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam bidang ketahanan pangan di tingkat kabupaten. Beberapa peraturan yang mendasari hal tersebut adalah adanya Undang-undang nomor 22 tahun 1999, Kepres nomor 177 tahun 2000 dan Kepres nomor 41 tahun 2001. Kelembagaan yang paling

sesuai dengan keadaan di Kabupaten Bogor adalah organisasi yang berbentuk kantor atau sub-unit ketahanan pangan pada dinas yang ada hubungannya dengan masalah Ketahanan Pangan dalam struktur organisasi Pemda Kabupaten Bogor.

Struktur kantor atau unit tersebut terdiri dari bagian yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan distribusi pangan, kewaspadaan pangan dan mutu pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan. Selain itu, struktur tersebut harus mempunyai hubungan kerjasama dan mekanisme kerja yang koordinatif, fungsional dan operasional baik antar lembaga maupun intern lembaga. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga lain, maka perlu melibatkan organisasi-organisasi lain seperti: Dinas yang terkait, LSM, Organisasi profesi, PKK/UPPKS, Dolog/Sub Dolog, Koperasi, Perbankan, Kelompok Tani/KTNA dan Perguruan Tinggi. Salah satu model bentuk struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:



2. Sistem Pemantauan dan Informasi Ketahanan Pangan

Sistem pemantauan dan informasi ketahanan pangan adalah proses dan kegiatan dinamis secara berkala dalam mengumpulkan data, menganalisa data, menyebarluaskan informasi untuk perumusan kebijakan dan perencanaan program serta evaluasi perkembangan situasi ketahanan pangan.

Sistem ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi situasi ketahanan pangan agar kerawanan pangan dapat dicegah dan ditanggulangi. Ruang lingkup daripada sistem tersebut adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisa data situasi ketahanan pangan dari Dinas/Lembaga/Instansi terkait dan menyediakan serta menginformasikan hasil analisis/pemantauan pada Pemda & sektor terkait. Keluaran yang diharapkan dari sistem tersebut adalah pemetaan kecamatan rawan ketahanan pangan dan laporan evaluasi / pemantauan.

Indikator-indikator yang dapat dipergunakan dalam sistem monitoring dan informasi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

Indikator	Level/ tingkat	Sumber Data	Waktu Pengumpulan	Kegunaan
1. Status Gizi - Balita KEP - Balita Gizi Buruk	Kabupaten Kecamatan Desa	DINKES (PSG-Balita SKDN Lap. KLB)	1 kali/ Thn	Pemetaan Peramalan Pengamatan
2. Kemiskinan - Pra Sejahtera (KK Miskin)	Kabupaten Kecamatan Desa	BKKBN	1 kali/ Thn	Identifikasi Intervensi Pemetaan
3. Ketersediaan - Luas kerusakan - Luas panen - Produksi padi/palawija - Perikanan/Peternakan	Kecamatan.	Pertanian Peternakan/Peri kanan Dolog	Bulanan	Pemetaan/Per amalan
5. Distribusi pangan - Harga pangan - Cadangan pangan - Perdagangan pangan	Kecamatan /Desa Kabupaten.	Dinas Pasar INDAG	1 Bln	Peramalan

Lanjutan...

Indikator	Level/tingkat	Sumber Data	Waktu Pengumpulan	Kegunaan
4. Konsumsi pangan - Konsumsi pangan - Kebiasaan makan	Kabupaten Desa	DINKES PKK	1 kali / Thn musim Panceklik	Recall Pengamatan
6.Keamanan pangan - Mutu Makanan - KLB Keracunan	Kabupaten	DINKES POM	1 Thn Insidental	Peramalan/Pe mantau-an

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem monitoring dan informasi ketahanan pangan tingkat kabupaten adalah:

- Perlu penyeragaman atau penyatuan data dari dinas-dinas terkait dan penyederhanaan form isian
- Perlu kelembagaan yang menangani sistem monitoring dan informasi
- Perlu adanya pertemuan rutin tim monitoring dan informasi
- Perlu training petugas lapangan untuk menghasilkan data berkualitas
- Tersedia anggaran operasional

3. Program Aksi Ketahanan Pangan

Telah diidentifikasi ada 6 program aksi ketahanan pangan daerah seperti tercantum pada table di bawah ini. Implementasi masing-masing program aksi tersebut akan bervariasi antar wilayah tergantung tipologi wilayah. Tipologi wilayah dalam hal ketahanan pangan dibagi tiga, yaitu wilayah rawan pangan, b) wilayah perbatasan, dan wilayah sentra produksi pangan.

1. Pengembangan lumbung pangan
2. Peningkatan produksi dan konsumsi pangan lokal
3. Pengembangan makanan tradisional
4. Pemanfaatan pekarangan
5. Sistem kewaspadaan pangan
6. Pemberdayaan ketahanan pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan

Kegiatan dari masing-masing program aksi ketahanan pangan daerah menurut tipologi wilayah (wilayah rwan pangan, wilayah perbatasan, dan wilayah sentra produksi) adalah sebagai berikut:

I. Pengembangan lumbung pangan

Rawan Pangan	Perbatasan	Sentra Produksi
<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat/lokasi beras murah b. Kemitraan dengan DD c. Subsidi saprodi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. pembelian gabah/beras petani b. pasca panen (kemitraan dgn puslitbang/industri) c. peningkatan nilai tambah produksi pangan d. pengolahan pangan

II. Peningkatan pangan lokal

Rawan Pangan	Perbatasan	Sentra Produksi
<ul style="list-style-type: none"> 1. penganeekaragaman produk/komoditas pgn (sayuran, umbi, buah) 2. bantuan saprodi yang cocok dengan lokasi 3. irigasi 4. industri olah skala rumahtangga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. penganeekaragaman produk/komoditas pangan (sayuran, umbi, buah) 2. promosi/display 3. pemberdayaan koperasi/mitra usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. penganeekaragaman produk/komoditas pangan (sayuran, umbi, buah)

III. Pengembangan Pangan Tradisional

Pangan tradisional yang perlu dikembangkan di Kabupaten Bogor didasarkan pada pangan lokal seperti: seperti talas, singkong, pisang, pala, pepaya, kemang, rambutan, mangga, nanas, cempedak dan jamur.

IV. Pemanfaatan Pekarangan

Lahan pekarangan juga perlu dimanfaatkan secara produktif dengan cara mengusahakan ikan hias, tanaman hias, keramba, apotik hidup, warung hidup dan ternak (ayam, kambing, itik, domba)

V. Sistem Kewaspadaan Pangan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem kewaspadaan pangan untuk Kabupaten/Kota (Kab. Bogor) adalah:

- a. Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan
- b. Penguatan kelembagaan lumbung desa
- c. Perencanaan pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan
- d. Peta kondisi pangan
- e. Jaringan dan informasi pangan

VI. Pemberdayaan Ketahanan Pangan

Beberapa langkah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten/Kota (Kab. Bogor) adalah:

1. Intensifikasi

a. Penyuluhan:

- peningkatan produk dan mutu
- *business gathering*
- pemasaran
- kemitraan

b. Peningkatan kapasitas SDM

- pelatihan
- pendampingan

2. Perluasan Areal Tanaman Pangan

- tumpang sari
- perhutanan sosial
- pemanfaatan lahan tidur *↳ agropedia warga*
- pemanfaatan vegetasi hutan dengan pola penangkaran di *bufferzone*

3. Diversifikasi Pangan

Pengolahan berbagai produk untuk menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan dapat dikonsumsi oleh warga Kabupaten Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi pada tanggal 2 – 3 Oktober 2001. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong Jawa Barat dan dihadiri lebih dari 250 peserta yang berasal dari berbagai organisasi seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, LSM, peneliti, mahasiswa, masyarakat umum serta jajaran staff Pemerintah Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini adalah kegiatan tindak lanjut dari Seminar Nasional “Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi” yang telah diselenggarakan pada 29 Maret 2001 di Departemen Pertanian, Jakarta dimana salah satu rekomendasi hasil seminar tersebut adalah sinkronisasi kebijakan makro dan mikro di bidang ketahanan pangan.

Penyelenggaraan dialog dan penerbitan prosiding ini dapat berlangsung dengan baik karena adanya bantuan dari berbagai pihak antara lain adalah Partnership for Economic Growth-USAID, Badan Bimas Ketahanan Pangan-Departemen Pertanian dan PT Monagro Kimia serta pihak-pihak lain yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Untuk itu, AGRINDO Aneka Consult dan Pusat Studi Kajian Pangan dan Gizi-IPB mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya kami berharap agar prosiding ini bermanfaat bagi para pembuat keputusan kebijakan, tokoh politik, tokoh LSM, universitas, peneliti, pelaku agribisnis dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam bidang ketahanan pangan di Indonesia.

Jakarta, November 2001

AGRINDO Aneka Consult &
PSKPG – IPB

DAFTAR ISI

	Halaman
RUMUSAN HASIL DIALOG & LOKAKARYA	i
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
SAMBUTAN KETUA PANITIA	xi
SAMBUTAN BUPATI KABUPATEN BOGOR	xiii
KEYNOTE ADDRESS: Membangun Kerjasama Ketahanan Pangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Institut Pertanian Bogor. Prof. Dr. Ir. H. M. Aman Wirakartakusumah, MSc. Rektor IPB	A1 - 7
Makalah 1. Harmonisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional dan Daerah. Dr. Achmad Suryana. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan-Departemen Pertanian	B1 - 20
Makalah 2. Pembangunan Pangan di Era Otonomi Daerah Dr. Hardinsyah MSc. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Fakultas Pertanian, IPB	C1 - 12
Makalah 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Industri Kecil Menengah di Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus LPZ Dompot Dhuafa Republika). Ir. Jamil Azzaini. Direktur Pemberdayaan Dompot Dhuafa Republika	D1 - 13
Makalah 4. Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan di Jawa Timur. Ir. Apriyanto MM. Badan Ketahanan Pangan, Propinsi Jawa Timur	E1 - 9

- Makalah 5.** Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor. **Drs. H. Harun Heryana MSi.** Kepala Bappeda Kabupaten Bogor. F1 - 20
- Makalah 6.** Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis. **Ir. Endang Supardi.** Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis G1 - 8

Lampiran

- ♦ Lampiran 1. Susunan Panitia
- ♦ Lampiran 2. Susunan Acara
- ♦ Lampiran 3. Daftar Peserta

UCAPAN TERIMA KASIH

SAMBUTAN KETUA PANITIA
PADA DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI
Cibinong, 2 – 3 Oktober 2001

Yang kami hormati:

Bapak H Agus Utara Effendi, Bupati Kabupaten Bogor
Bapak Prof. Dr. Ir. HRM Aman Wirakartakusumah, MSc., Rektor IPB
Mr. Jeffry Povolny, PEG Manager
Bapak Dr. Achmad Suryana, Kepala BBKP Departemen Pertanian
Bapak Prof. Dr. Soekirman, Kepala PSKPG-IPB
Bapak Ir. Karhi Sukartaatmadja, Presiden Direktur AGRINDO Aneka Consult

Assalamu'alaikum Wr. Wb dan Selamat Pagi.

Kami panitia Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak / Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini.

Kegiatan ini merupakan tunas dari sebuah kegiatan yang telah kami selenggarakan pada bulan Maret 2001 di Auditorium Departemen Pertanian. Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi yang telah terselenggara tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu untuk ditindaklanjuti dan sebagai salah satu hasilnya adalah kegiatan dialog dan lokakarya yang Bapak / Ibu hadirin pada hari ini.

Kegiatan ini diselenggarakan di tengah-tengah krisis ekonomi dan politik yang sampai saat ini belum terlihat ujungnya. Di dalam keadaan yang serba belum menentu ini dengan masih terlihat banyak perubahan-perubahan di dalam struktur organisasi pemerintahan kita, kami dari panitia ingin berbuat sesuatu untuk kami sumbangkan demi perbaikan

perekonomian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Kami menyadari bahwa sumbangan ini hanyalah sebuah batu bata kecil tetapi kami berharap hasil dialog dan lokakarya ini mampu menopang pondasi bangunan yang lebih besar dan menggugah kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dan bergotong-royong memperbaiki keadaan kabupaten kita ini.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik antara panitia dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan Partnership for Economic Growth-USAID. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih pula atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah banyak membantu penyelenggaraan acara ini baik dalam bentuk bantuan tenaga dan pikiran maupun dana yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini.

Permohonan maaf tak lupa kami sampaikan atas segala tindak tanduk panitia yang baik disengaja maupun tidak disengaja telah menyinggung perasaan berbagai pihak termasuk Bapak / Ibu sekalian.

Demikianlah sambutan kami. Atas perhatian Bapak / Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih

Cibinong, 2 Oktober 2001

Ari Raharjo

Ketua Panitia

SAMBUTAN PEMBUKAAN
DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI ERA OTONOMI
CIBINONG, SELASA, 2 OKTOBER 2001¹
Oleh : H. Agus Utara Effendi²

ASSALAMU' ALAIKUM WR. WB.

- YTH. KETUA DPRD KABUPATEN BOGOR ATAU YANG MEWAKILI;
- YTH. REKTOR IPB;
- YTH. PARA PEJABAT DAN UNDANGAN;
- YTH. PARA NARASUMBER SERTA PANITIA DIALOG DAN LOKAKARYA;
- PARA PESERTA DIALOG DAN LOKAKARYA SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI.

Syukur alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara pembukaan dialog dan lokakarya yang membahas tema "Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi".

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama pemerintah kabupaten Bogor mengucapkan "Selamat Datang" kepada para undangan serta seluruh peserta dialog dan lokakarya yang telah hadir, disertai harapan semoga upaya yang kita laksanakan melalui kegiatan ini dapat memberi arti yang positif bagi proses pemantapan kebijakan dan program ketahanan pangan di era otonomi daerah sekarang ini.

¹ Disampaikan pada acara Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi, 2-3 Oktober 2001, Ruang Serba Guna I Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong.

² Bupati Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, apabila kita melihat tema yang akan dibahas dalam kegiatan dialog dan lokakarya ini, saya pandang memiliki arti penting dan sangat strategis sebagai langkah antisipasi yang tepat dalam rangka menyikapi otonomi daerah yang antara lain memberikan perhatian yang lebih besar kepada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan hal itulah, kami pun mengucapkan “Terima Kasih” kepada semua pihak yang telah menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Bogor dalam kegiatan dialog dan lokakarya ini, seperti halnya Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB, Partnership for Economic Growth (PEG) – USAID, Agrindo Aneka Consult dan Badan Bimas Ketahanan Pangan.

Mudah-mudahan kerjasama yang telah baik tersebut dapat terus terjalin, baik dalam pengembangan ketahanan pangan dan gizi maupun dalam bidang pembangunan lainnya.

Saudara-saudara yang saya hormati.

Kita ketahui bersama bahwa sejak pertengahan tahun 1997, kehidupan bangsa dan negara kita mengalami fase kritis yang sangat memprihatinkan dan belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini. Krisis ekonomi yang kemudian berimbas pada berbagai sektor, telah mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya.

Kenyataan ini telah berakibat kepada semakin meningkatnya angka kemiskinan dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam hal pengadaan pangan dan pemenuhan gizi yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki.

Hal ini sangat memprihatinkan, karena kita sadari bersama bahwa tanpa pemenuhan pangan dan gizi yang memadai, kualitas sumberdaya manusia kita akan mengalami kemerosotan dan bahkan dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya generasi yang hilang.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang pembangunan ketahanan pangan yang secara konseptual tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti misalnya Inpres nomor 8/1999 tentang penanggulangan masalah pangan dan gizi serta Keppres nomor 41/2001 tentang Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP).

Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memulihkan laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan yang lebih mengandalkan kemampuan domestik dengan menjadikan agribisnis sebagai penggerak pembangunan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Namun demikian, hendaknya disadari bahwa implementasi kebijakan dan program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan tersebut, tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat termasuk di dalamnya kalangan Perguruan Tinggi, LSM dan seluruh warga masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitan inilah, prakarsa penyelenggaraan dialog dan lokakarya ini kiranya dapat memberikan sumbangsih nyata dalam upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dengan implementasi otonomi daerah yang sedang dikembangkan dewasa ini.

Hadirin yang saya hormati.

Demikian sambutan yang ingin saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dialog dan lokakarya dengan tema “Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi”, saya nyatakan resmi dibuka.

Semoga Allah subhanahu wata’ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

BUPATI BOGOR

H. AGUS UTARA EFFENDI

**MEMBANGUN KERJASAMA KETAHANAN PANGAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR¹**

Cibinong, 2 Oktober 2001

Oleh Prof.Dr.Ir. H. M. Aman Wirakartakusumah, MSc.²

Yth. Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan (BBKP), Departemen Pertanian R.I.

Yth. Bupati Kabupaten Bogor

Yth. Para Bupati dan Walikota di Propinsi Jawa Barat dan Banten

Yth. Para Pembicara

Yth. Hadirin peserta Dialog dan Lokakarya Ketahanan Pangan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.

Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mewujudkan niat baik kita untuk saling sumbang-pikir dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di tanah air melalui Dialog dan Lokakarya yang diselenggarakan atas kerjasama PSPKG-IPB, Pemda Kabupaten Bogor, Agrindo Aneka Consult dan Badan Bimas Ketahanan Pangan, Deptan R.I. ini.

¹ Disampaikan pada acara Dialog dan Lokakarya Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan di Era Otonomi, 2-3 Oktober 2001, Ruang Serbaguna I, Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong

² Rektor Institut Pertanian Bogor

Hadirin peserta lokakarya yang saya hormati,

Adalah suatu nikmat bahwa kita Bangsa Indonesia dikarunia dengan kekayaan alam yang berlimpah. Daratan dan lautan yang sangat luas dengan segala flora dan fauna yang ada di dalamnya serta sumberdaya alam lainnya merupakan kekayaan yang tak terkira jumlahnya. Dengan apa yang kita miliki tersebut semestinya kita semua dapat hidup sejahtera, cukup pangan, sandang, papan dan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Namun apabila kita melihat pada data statistik atau melakukan pengamatan ternyata fakta yang ada berbicara lain. Kesejahteraan ternyata tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang terpendam di perut dan permukaan bumi. Dengan karunia kekayaan alam yang berlimpah tadi ternyata kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi seluruh masyarakat kita yaitu kebutuhan pangan. Benarkah demikian?

Marilah bersama-sama kita cermati fakta-fakta yang ada :

1. Saat ini sekitar 18 % rumah tangga (atau sekitar 40 juta penduduk) tergolong miskin sehingga kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan
2. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk masih rendah, dimana sekitar 48 juta penduduk mengkonsumsi energi kurang dari 70 % kecukupan gizi yang dianjurkan, dan dua pertiga dari konsumsi tersebut dipenuhi dari padi-padian dan umbi-umbian sehingga konsumsi pangan cenderung kurang beragam
3. Sebanyak 5.0 juta anak balita ditengarai menderita gizi kurang, dimana 2.4 juta anak diantaranya menderita gizi buruk sebagai akibat kurangnya akses pangan keluarga, buruknya praktek pengasuhan serta kurangnya pelayanan fasilitas kesehatan
4. Tidak hanya anak balita, sebanyak 7.5 juta wanita usia 15-45 tahun diperkirakan juga menderita gizi kurang
5. Sekitar 50 % ibu hamil dan 30 % anak sekolah menderita anemia gizi
6. Sekitar 1 juta orang hidup dalam kamp-kamp pengungsian dengan ketersediaan pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat terbatas

Dari apa yang kita ketahui selama ini, berbagai permasalahan tersebut umumnya terjadi karena salah satu atau kombinasi dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya ketimpangan antara kebijakan ekonomi makro dan mikro
2. Pembangunan pertanian yang selama ini bias pada kebijakan beras dan lebih berorientasi pada penduduk kota
3. Masih lemahnya sistem informasi, manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan
4. Kurangnya sinergi pembangunan agribisnis dan ketahanan pangan
5. Semakin mudarnya solidaritas sosial
6. Lemahnya pondasi perekonomian nasional, sehingga krisis ekonomi terjadi secara berkepanjangan

Hadirin peserta lokakarya yang saya hormati,

Dari apa yang saya utarakan tadi nampak bahwa kesejahteraan masyarakat atau suatu bangsa ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan sumberdaya alam. Bagaimana kekayaan alam tersebut dikelola untuk kesejahteraan rakyat adalah hal yang lebih penting lagi dibanding kekayaan alam itu sendiri. Nilai PDRB Kabupaten Bogor termasuk dalam kategorin tinggi di Indonesia, tetapi disadari pada masa krisis dan otonomi, masalah gizi masih menjadi masalah serius di Kabupaten Bogor. Kesejahteraan rakyat dengan demikian banyak ditentukan oleh akal budi. Bukti menunjukkan bahwa ada beberapa negara yang tidak memiliki sumberdaya alam memadai, seperti Singapura misalnya, hidup dalam kemakmuran. Pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan penduduk lainnya dapat terpenuhi meski tidak seluruhnya merupakan hasil bumi sendiri.

Oleh karena itu kalau hari ini kita akan mendiskusikan berbagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka kita harus membahasnya dalam kerangka bagaimana kita bisa mensinergikan segala sumberdaya yang ada di lingkungan kita: potensi alam (lahan dalam artian luasan dan kualitas; air/irigasi; iklim/cuaca; keragaman hayati; dsb); potensi sumberdaya manusia (petani, buruh, tenaga lapang, pengambil kebijakan, peneliti, dsb);

kelembagaan (lembaga petani, lembaga keuangan, pemerintahan, perguruan tinggi, dsb); teknologi (*endogenous* maupun *modern technology*); serta segala potensi lain yang mungkin untuk dimobilisasi dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi perwujudan ketahanan pangan yang lestari. Sinergisme potensi ini penting karena masalah ketahanan pangan bersifat multikompleks dan multidimensional.

Hadirin sekalian,

Kita masih ingat bahwa pada era pertengahan tahun 80-an, negara kita telah berhasil berswasembada beras. Belajar dari sejarah, apa yang dicapai pada saat itu merupakan hasil dari kerjasama antar berbagai pihak terkait seperti masyarakat petani, lembaga/institusi pemerintah, khususnya jajaran Deptan dan instansi lain yang terkait, LSM, lembaga internasional, lembaga-lembaga penelitian serta perguruan tinggi. Namun demikian keberhasilan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Saat ini sekitar 10 persen dari beras yang beredar di tanah air berasal dari impor. Disamping swasembada beras yang tidak lestari, indikator lain seperti konsumsi pangan dan status gizi juga tidak menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan, dimana fakta-faktanya telah saya ungkapkan tadi. Tentu banyak faktor yang menjadi penyebabnya, beberapa diantaranya juga telah saya sebutkan. Benturan kepentingan masih sering terjadi. Lahan produktif seringkali menjadi korban dari perkembangan industrialisasi dan fasilitas pendukungnya (perumahan, fasilitas sosial seperti fasilitas olah raga, fasilitas perdagangan, dsb). Sementara itu penelitian banyak penelitian dari berbagai lembaga penelitian yang ada, termasuk perguruan tinggi, yang hasilnya secara 'revolusioner' bisa diaplikasikan untuk mendongkrak produktivitas dan produksi pangan di Indonesia yang saat ini mengalami *leveling off*. Lembaga-lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan, baik di level mikro maupun makro juga banyak yang tidak berfungsi optimal. Lumbung desa yang pada masa lalu menjadi tumpuan masyarakat untuk memperoleh pangan saat paceklik kini tidak berfungsi lagi. Bulog yang dulu berperan menjaga stabilitas harga pangan dengan memanfaatkan *buffer stock* yang dimiliki, kini tidak

bisa lagi mengemban fungsi serupa secara maksimal. Akumulasi berbagai faktor ini ditambah krisis multidimensi yang berkepanjangan serta faktor-faktor lain yang juga mungkin berperan pada akhirnya telah mengakibatkan kondisi ketahanan pangan kita saat ini menjadi rapuh.

Tentu saja kita tidak bisa hanya menyesali apa yang telah terjadi. Di bawah tantangan dan peluang baru yang menghadang didepan kita, yaitu otonomi daerah, kita harus mampu mewujudkan ketahanan pangan di setiap wilayah, yang pada akhirnya semua ini akan menjadi basis bagi ketahanan pangan secara nasional. Bahu-membahu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, perguruan tinggi, LSM, industri, masyarakat sasaran, serta seluruh pihak terkait saya yakin akan mampu kita jadikan sebagai modal dasar perwujudan ketahanan pangan di setiap wilayah. Revitalisasi dari berbagai program dan kelembagaan ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti lumbung desa, Posyandu, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dsb perlu dilakukan, seiring dengan program-program lainnya dalam spektrum sistem pangan dan gizi yang luas, mencakup aspek produksi, distribusi, aksesibilitas pangan dan pemanfaatan pangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Hadirin sekalian,

Sebagai salah satu perguruan tinggi besar yang berada di wilayah Bogor, IPB ingin berbuat banyak untuk kesejahteraan penduduk Bogor melalui kerjasama IPB-Pemda dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, terutama dari sisi agribisnis/agroindustri, ketahanan pangan, dan lingkungan.

Selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai hak asasi manusia, pembangunan ketahanan pangan sangat penting untuk dilakukan karena mempunyai banyak nilai strategis. Diantara beberapa nilai strategis yang bisa saya sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ketahanan pangan berperan penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan kinerja ekonomi makro, karena sebagian besar masyarakat kita menggantungkan pendapatannya pada bidang agribisnis;
2. Kajian menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan dapat berperan penting pada pemantapan fundamental ekonomi, pembentukan struktur ekonomi berimbang dan pengendalian laju inflasi;
3. Dengan terwujudnya ketahanan pangan derajat gizi dan kesehatan masyarakat akan lebih terjamin;

Untuk mendukung hal itu, sejak lama IPB telah mengembangkan kerjasama kemitraan dengan Pemda Kabupaten Bogor dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi efektifitas pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor kini kerjasama ini akan diperluas dan diperdalam dalam bidang pertanian dalam konteks pembangunan ketahanan pangan. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama-kerjasama skala kecil yang telah dirintis oleh unit-unit di IPB maupun Pemda Kabupaten Bogor pada masa lalu.

Akhirnya untuk menutup sambutan ini perkenankanlah saya selaku Rektor IPB menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memungkinkan kegiatan ini terlaksana, khususnya kepada Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi, Lembaga Penelitian IPB, Pemda Kabupaten Bogor, Badan Bimas Ketahanan Pangan Deptan, PT Agrindo Aneka Consult, hadirin peserta lokakarya, dan tentu saja kepada Panitia Penyelenggara yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kegiatan ini.

Saya yakin bahwa kerjasama ini tidak akan berhenti sampai disini karena upaya mewujudkan ketahanan pangan adalah upaya terus menerus tanpa henti. Oleh karena itu saya berharap kerjasama ini akan terus berlanjut.

Billahittaufig wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rektor,

Lampiran

Pusunan Panitia

**SUSUNAN PANITIA
DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI, 2-3 Oktober 2001**

Pengarah : Dr. Ahmad Suryana (Ka. BBKP, Deptan RI)
H. Agus Utara Effendi (Bupati Kabupaten Bogor)
Prof. Dr. Aman Wirakartakusuma, MSc. (Rektor IPB)
Ir. Karhi Sukartaatmadja (Direktur Agrindo)
Prof Dr. Soekirman (Kepala PSKPG, IPB)
Dr. Hardinsyah (Sekretaris Eksekutif PSKPG, IPB)

Pelaksana : Ketua : Ir. Ari Raharjo, MBA
Wk. Ketua I : Suwandi BE
Wk. Ketua II : Dr. Budi Setiawan

Sekretaris I : Dr. Yayuk F. Baliwati
Sekretaris II : Syarifah Sofiah D, MS
Bendahara : Ir. Siti Madanijah, MS

Seksi Acara : Ir. Dodik Briawan, MCN
Dr. Ir. Ujang Sumarwan Msc
: Dr. Ir. Drajad Martianto MS
: Ir. Meila D Andrestian
: Maman Hermansyah

Seksi Logistik : Drs. Dadang Irvan
: Ir. Eddy S. Mudjajanto, MS
Djayadi

Seksi Konsumsi : Popon Kartinah
Nina Wahyuni, SE

Lampiran

Pusunan Acara

**SUSUNAN ACARA
DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI
Selasa-Rabu, 2-3 Oktober 2001**

Hari I (Selasa) : Ruang Serbaguna I

Acara	Pembicara	Waktu
Pendaftaran		08.00 - 08.30
I. Pembukaan	MC	08.30 - 09.00
- Laporan Ketua Panitia	Ari Raharjo	
- Sambutan & Pembukaan oleh Bupati Kabupaten Bogor	H. Agus Utara Effendi	
- Keynote Address	Prof. Dr. Ir. HRM. Aman Wirakartakusumah, MSc.	
REHAT KOPI		09.00 - 09.30
II. Sesi I	Moderator : Dr. Joyo Winoto Karo Pertanian Pengairan dan Kehutanan , Bapenas	09.30 - 11.30
1. Pembangunan Pangan di Era Otonomi	Dr. Hardinsyah, MS.	
2. Harmonisasi Kebijakan Ketahanan Pangan pada Tingkat Makro dan Mikro	Dr. Achmad Suryana Ka. BBKP, Deptan	
ISHOMA		11.30 - 12.30
III. Sesi II	Moderator : Ir. Lalu Suryade Komisi B DPRD Kab. Bogor	12.30 - 14.30
Pemberdayaan Masyarakat dan Industri Kecil Menengah	Ir. Jamil Azzaini Yayasan Dompot Du' affa	
Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan di Propinsi Jawa Timur	Ir. Apriyanto, MM. Kasubdit Perumusan Program, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur	
REHAT KOPI		14.30 - 15.00
IV. Sesi III	Moderator : Dr. Yayuk F Baliwati Asda II Kab. Bogor	15.00 - 17.00
1. Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan di Kab. Ciamis	Ir. Endang Supardi Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis	
2. Pengalaman Empiris Manajemen Ketahanan Pangan di Kab. Bogor	Drs. H. Harun Heryana Kepala Bapeda Kabupaten Bogor	

**SUSUNAN ACARA
DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI
Selasa-Rabu, 2-3 Oktober 2001**

Hari II (Rabu) : Gedung Tegar Beriman, Ruang VIP A dan Ruang VIP B

Acara	Pimpinan Sidang	Waktu
Pendaftaran		08.00 - 08.30
Sesi I Penjelasan Tata Tertib Lokakarya dan Pembagian Kelompok		08.30 - 09.00
REHAT KOPI		09.00 - 09.30
Sesi II Diskusi Kelompok Terbagi dalam 3 kelompok, masing-masing tema sbb :		09.30 - 12.00
1. Kelembagaan dan mekanisme kerja ketahanan pangan Kabupaten Bogor.	Ir. Yan Mulyana Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Bogor	
2. Sistem monitoring dan informasi ketahanan pangan Kabupaten Bogor.	dr. Siane Nursianti T,MM Kasubdin Binkesmas Dinas Kesehatan Kab. Bogor	
3. Program-program aksi ketahanan pangan kabupaten Bogor.	Drs. H. Harun Heryana Kepala Bapeda Kab. Bogor	
ISHOMA		12.00 - 13.00
Sesi III Laporan kelompok dan perumusan	Prof. Dr. Soekirman Kepala Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi, IPB	13.00 - 14.30
<i>Door Prize</i>	MC	14.00 - 14.15
Sesi IV Penutupan	Ir. Yan Maulana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bogor	14.15 - 14.30

Lampiran

Daftar Peserta

**DAFTAR PESERTA HARI 1
DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI, 2 Oktober 2001**

NO	NAMA	JABATAN
1	Budi Pitoyo	Ketua Koperasi Wana Sejahtera
2	Ir. Domon, S. Suparman, MM	Kepala UPBJJ UT Bogor
3	Ir. Purnomo Tri Supto Wahyudi	Kappesar DKI Jabobek
4	Ir. Anrizal	Ka. BKP Prop. Sulawesi Tengah
5	Ir. Arman Moenek, MEd	Ka. BBKP Prop. Sumbar
6	Dr. Ir. Hardoko, MS.	Kajur Teknologi Pangan Univ. Pelita Harapan
7	Ir. Hj. Dwiati Retno Widiastuti	Kasubdinas BKP Prop. Sulawesi Tenggara
8	Drs. H. Diding Kusmadi	Sekretaris LPKM Univ. Negeri Jakarta
9	Ir. Abdul Kaher, MS.	R&D Manager PT. Fadjarpurnama Pratama Inti
10	Utoro E. Santoso	Koperasi Agro Pasundan
11	Ir. S. Alina Tampubolon, MPSt	Kasubdit Pengawasan Lingk. Pantai
12	Heri Dwinanto	Bagian Ekbang Pemkab Bogor
13	WR. Pelitawan, SH	Staf Desa Leuwiliang
14	Teguh Purwanto	PPL
15	Ir. Dedy	Fungsional Bekasi
16	Suhardi	Fungsional Bekasi
17	Wagino	PPL
18	Tati Hasanah	KCD
19	Titin Sukanto	Kepala Desa Cinangka
20	E. Winsamah	Sekdes Ciampea
21	Ade Jaya M	Kasubid
22	Nana Sukmana	Ka. BPP
23	M. Mulyana	Ka. BPP
24	Aam Nurjaman	Ka. BPP
25	Ir. Dewi A.	KCD Ciomas dan Tamansari
26	Akhmad	KCD Cileungsi
27	Drs. Adi Setyabekti	SekCam
28	Ir. Azrin Syamsuddin	Kabid Ekonom Bapeda
29	Moch. Yasrif Effendi	Kasi Ekonomi
30	Eddy Wardani, SH	SekCam
31	Drs. Zaenal Ashar	SekCam Gn. Putri
32	Nurdjaman	PPL

Lampiran Dialog dan Lokakarya Kebijakan & Program Ketahanan Pangan di Era Otonom

NO	NAMA	JABATAN
33	K. Suganda	-
34	H. Memed Adipriatna, BA	Kades
35	Drs. Rosidin	SekCam Tenjo
36	Armansyah	Bimas
37	Sofyan	Bimas
38	Adang Sunarja	Wakadis Perhub.
39	Aris Mulyanto	SekCam
40	Daryana	KCD Pertanian
41	Hadi Purnama	Staf Naker
42	Cecep Komar	-
43	Endang. SB	SekDes
44	Artiana	Ketua TP PKK
45	Makruf	Ka. Sei Ekpag
46	Shobar Wiganda	Ka. Pus Kewaspadaan Pangan
47	Wawan M. Sidik	SekMat. Caringin
48	Ny. Wawan	Wk. Ketua TP PKK Carngin
49	Ny. Tuti Suparyo	Wk. Ketua TP PKK Bojong Gede
50	Ny. Tatik Yuswanti	Subsi Perekonomian
51	Saur P. Pandjaitan	DitJendKam Tangkap
52	Ny. Yati Handayani Sujana	Ket. TP. PKK Kec. Megamendung
53	Muhamad S	-
54	Subarnas	DisTam Kab. Bogor
55	Mahbud	SekCam
56	Sudono	SekCam Babakan Madap
57	Endang Supardi	KKP Ciamis
58	Isbiyanti	KCD Pertanian
59	Ny. Erita Yoeswar	PKK Kab
60	Drs. Budi Lukman NH	SekCam Gunung Sindur
61	Drs. Didin Wahidin	SekCam
62	Ny. Yunani M.W	Ketua TP PKK
63	Dody Djuhardy	Wakil
64	Adang Suryatna	PPL Kec. Ciampea
65	Endang Suharsiwi	Subsi BUW
66	Surya Sumini, Dra	-
67	Ny. Elan. S	Ketua TP PKK
68	Joyowinoto	BAPPENAS
69	Ny. Indra Komara	Ketua TP PKK
70	Koswara	KCD Pertanian
71	Yodi MS Ermaya	SekCam

NO	NAMA	JABATAN
72	Ny. Idi Iskandar	Peng. PKK Kab. Bogor
73	Endang Subekti	Pokja IV
74	Unang AG	PPL
75	Ngatno	Ka. Pembantu
76	Nina	Kasubdit Produksi
77	Ny. Suwanda	Ket. TP. PKK
78	Sarah Susanti	-
79	Ny. Wiwi Mulyanto	Wk. Ket. TP. PKK Jonggol
80	Rachmat Ismail	KCD Pertanian
81	Bunbun Ali	PPL
82	Saripudin	Pem. KCD. Pertanian
83	Daddy KS. Kusnadi	KSS. Int. EXS
84	Rahmat Nugraha	KaSie Dramaga
85	Choirul Anna N.A	GMK IPB
86	Ny. Hj. Harun Heryana	PKK Kab. Bogor Pokja I
87	Lukman	Kasi Statistik
88	Ny. Yany T. Afandi	PKK Dramaga
89	Ny. Nani T	PKK Rancabungur
90	Wawan K	SekCam
91	Ny. Linda F	PKK Parung
92	Zainandi	SekCam
93	Agus Widor	BBKP
94	M. Hamzah	BBKP
95	Harun AS	BBKP
96	Joko T	BBKP
97	Bambang WT	SekCam Cisarua
98	Nurhaman	Kel. Tengah Tibing
99	Suratmi	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
100	Wahyudi	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
101	Agum	SekCam
102	Atin Supriatin	PPL
103	Edi Mulyadi	SekCam
104	Dace Supriadi	SekCam
105	Ny. Yani Darmawan	Ket. TP PKK Kec. Rumpin
106	Ny. Pasti Tampubolon	SDM-Deptan
107	A. Kartiwa	Pelaksana
108	Ely Suyatman	Ketua Pokja II
109	Sri Setiawan	WKL. Ketua
110	Earnie W, SH	BAPEDA

NO	NAMA	JABATAN
111	Halniwati Supriadi	Citeureup
112	Herry S	KaBidWas Perekonomian BAWASDA
113	Neny Effendi	Ketua TP PKK Kec. Gn Putri
114	Sofyan	PPL
115	Edi Juhara	PPL
116	Yayat Ahdiyati	KCD Pertanian
117	Sapna V	Ka. BIPP
118	Tita Masitha	Mahasiswa
119	Entis Sutisna, Amd	PPL
120	Suryana Hopsa	PPL
121	Danang M	Ka Sie PPI
122	Aan Yuhana	KCD
123	Caca Syarip Hidayat	Koordinasi
124	Rijalullah	PPL
125	A. Dudung	PPL
126	Yayan Mulayana	PPL Koordinator/BPP
127	Ny. Etin Hidayat	Pokja IV
128	Ny. Deddy Hediana	Mewakili Ketua TP. PKK
129	Ny. Teti Yuniarti	Pokja III
130	Ny. Hj. Sumiarti	Wk. Ketua
131	Ny. Hapsah Tarmidi	Sek TP. PKK
132	Dr. Saine NT	-
133	Setiawan SH	SekCam
134	Hj. Nurlela Suhandi	Ket. TP. PKK Kec. Gunung Sindur
135	Juju S	-
136	Dadi Gumilar	KaSubDin
137	Sunarto	KCD Pertanian
138	Entis Sutisna	PPL Citeureup
139	Yaman Sanusi	SekDes
140	Aam S	Sek Bimas
141	Yoyo Sahril	KCD
142	Lena Herlina	Sek PKK
143	Sutadi Djamil	-
144	Dadang Wiganda	KCD
145	Kusin Y	PPL
146	Nusyirwan Talieb	Dit. Budidaya
147	Ugan Pundima	-
148	Djaenudin H	Sie Prod. Dinas Pertanian
149	H. Cecep R	PPL

NO	NAMA	JABATAN
150	Asep Hidayat	PPL
151	Agus Setiadi	PPL
152	Sutristo	SekCam
153	E. Mulyadi	SekCam
154	Adang S	Sub Bidang
155	Latifah	PKK Kec Cijeruk
156	Saiful Bachri	Seksi Identifikasi
157	Primantri	Sie Pangan
158	Sodikin	KCD
159	Marhun	PPL
160	Yayat R	BIPP
161	E. Sujanapria, Ir	Ka. BPP
162	Mahfudiri Adhiyanto	PPL
163	Suyana	KCD
164	Drs. Ari Wahyono, Msi	Kabid Tata Operasional Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI
165	Dr. Rimbawan	PD III Faperta IPB
166	Dewi Handayani	Redaktur Majalah Ayah Bunda
167	Ir. Muchlis Hasan	Kapus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat, BBJP Deptan
168	Drs. Tarwan Adi Teruna	Kabid Motivasi dan Promosi, BBKP, Deptan
169	Drs. H. Sukmawijaya, MM	ASDA II Kabupaten Sukabumi
170	Ir. Dedi Kurnia	Ka. Subdin Produksi Padi dan Palawija Diperta Kab. Bandung
171	Ir. Juju R. Sumono	Kasubdin Teknologi Produksi Dinas Peratanian Kota Bogor
172	Eneng Supenti, STP	Dinkes Kota Sukabumi
173	Drs. Abraham Fanggalda	Kabag Pengembangan Usaha Depsos
174	Tin Herawati, SP	Asisten Peneliti/Mha. Pasca Sarjana GMSK IPB
175	Ira Endah Rohima, ST	Mahasiswa Pasca IPB
176	Naning Hadiningsih, STP	Mahasiswa Pasca IPB
177	Elin Meylina	Mahasiswa Pasca IPB
178	Nawangwulan Widyastuti, SP	Asisten Ahli/Mhs Pasca
179	Fanny Fardha, Spi	Mahasiswa Pasca IPB
180	Ir. Maesti mardiharini	Mahasiswa Pasca IPB
181	M.TH. Chatarina, Dra	Mahasiswa Pasca IPB
182	Dra. Erli Mutiara	Mahasiswa Pasca IPB
183	Qorih Saleha, Spi	Mahasiswa Pasca IPB
184	Ir. Aslis Wirda Hayati	Mahasiswa Pasca IPB

NO	NAMA	JABATAN
185	Ir. Hermawan	Kasubdin Agribisnis Dinas Pertanian Kab. Pandeglang
186	Ir. Ida Nurhamida, Msi	Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Kab. Bandung
187	Drh. Turni Rusli Syamsuddini, MM	Kasubdit Produk Pangan Hewani Dir. Kesravet
188	E. Daerobi Fachrudin	Kades Cibeber I Kec. Leuwiliang Kab. Bogor
189	Ir. Gatoet Sroe Hardono	Peneliti PSE
190	Ir. Mewa Ariani, MS	Peneliti PSE
191	Ir. Arlina Tampubolon, MPST	Kasubdit Pengawasan Lingkungan Pantai Ditjen Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
192	Betty Wargadinata	Kasubdit Pertanian Dinas Pertanian Bappeda Kota Bandung
193	Ir. Rina Susanti, MM	Kasubbid Penyusunan Program Ekonomi Bappeda Kab. Bekasi
194	Ir. Tria Riadiati	Kasubdin Agribisnis Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi
195	Yufirna, SE	Staf Pengembangan Program Dit. Industri Agro Ditjen IKAH Depperindag
196	Ir. Mulyadi Herdiawan	Kasubdit Pembiayaan Non Perbankan Ditjen BSP
197	Dr. Imam Sumarno, MPS	Ketua Klp Program Penelitian SKPG Puslitbang Gizi Depkes
198	Drs. Toto Subardjo, MM	Kasubdit Pengembangan Usaha Kecil
199	DR Abas B Jahari	Peneliti Puslitbang Gizi Bogor
200	Aing Pribadi	Badan BKP Deptan
201	Widiawati, AMG	Staf Kesra Dinkes Kab. Cianjur
202	Asri Ahsani Hayati	Himagita IPB
203	Siti Zulaiha P	Himagita IPB
204	Thabibi MT	-
205	M Taufik Rochman	PPS
206	Suprpto	Ketua Yayasan
207	Gatoet S Hardono	Peneliti
208	Asrijanti, SKM	Kasie Gizi
209	Maryani	KCD Pertanian
210	Drs. Sony Abdussukur, AK	Kasubag
211	Ir. Kosasih	BPP
212	Adeyana Mulyana, SH	SekCam Kemang
213	Haerul S	Kasie RKBANG
214	Mamah S	PKK Kec. Cimanggu

NO	NAMA	JABATAN
215	Sukandar	Kasubsi Ekonomi
216	Nining	PPL
217	Neneng	PKK
218	Achsan maula	Bag. Sos Setda
219	Kasniwari	PKK. Ciawi
220	Rohmat	SekDes
221	M. Hatta	Kelompok Tani
222	Linda F	Bag. Hukum
223	Rochmat S	PPL
224	Tatang Mulyadi	KCD
225	Sujono	KCD
226	Suratman	KCD
227	Ngentem Sinulingga	BPKP
228	Ir. Aep Rakhmat	Kasubsi Cipta Karya
229	Dra. Susilowati	Kasubsi
230	Reni J	Kasubsi
231	Iip S	KCD
232	Edy Rosyadi SH	Bapeda Bekasi
233	Iwan F. Malonda	Pusat Kewaspadaan Pangan, BBKP
234	Elly Wasliah	Kasubdin Produksi
235	Adang Haris	Ka. Gudang Dolog
236	Ipong Koswara	KCD
237	S. Sugito	KCD
238	W. Rusnan	KCD
239	Maman	PPL
240	Abdul Rojak	PPL
241	Hermawan	-
242	Cucum	KCD
243	Nano G Raliyan	Kasie Pelayanan
244	HM. Ruchimat	Kades
245	Agus Suratma	Kabag Ekonom Kab. Bandung
246	Ujas Supandi	K. Ekbang
247	Rofi Alhanif	Bappeda Kota Bandung
248	M.A Chozin	Faperta
249	Kusmawan	-
250	Tuti S	Staff
251	Machmud	Litbang
252	Mewa Ar	PLSE
253	Ning Pribadi	Kapus Ketersediaan Pangan Badan BKP

**DAFTAR PESERTA HARI 2
DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI, 3 Oktober 2001**

NO	NAMA	INSTANSI
1	Rijalulloh , Amd	BIPP
2	Ir. H. Subarnas Hidayat	Dinas Pertambangan Kab. Bogor
3	Daddy KS. Kusnadi, BScF.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bogor
4	Ir. A. Damanhuri	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bogor
5	Ir. Tri Radiati	Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi
6	Dewi Handayani, STP	Majalah Ayah Bunda
7	Isbiyanti	Dinas Pertanian Kab. Bogor
8	Tatik Yuswanti	Kecamatan Cibinong
9	Aam S.	SSP Bimas
10	Drs. Toto Subardjo, MM.	BKKBN Pusat
11	Turni Rusli S.	Dit. Kesmavet Ditjen Bina Produksi Peternakan
12	Dadang Wiganda	Dinas Pertanian Kab. Bogor
13	Sutadi Djamil	Kecamatan Cigudeg
14	Edmon R.	Dinas Peternakan Kab. Bogor
15	Moh. Mahbub	Kecamatan Ciseeng
16	Abdullah Sjirooz	Kecamatan Jasinga
17	Ir. Dewi A.	Dinas Pertanian Kab. Bogor
18	Dra. Kusniwati	Kecamatan Ciawi
19	Yanrisma P, SmHk	Kecamatan Rumpin
20	Kusmawan	Kantor Penerangan dan Telematika
21	Budi Lukman NH.	Kecamatan Gunung Sindur
22	Suyana	Kecamatan Cibungbulang
23	Mamah	Kecamatan Cibungbulang
24	Lena Herlina BSW	Kecamatan-Cigudeg
25	Yayat Ahdiyati	Dinas Pertanian Kab. Bogor
26	Adang S.	Dinas Pertanian Kab. Bogor
27	Ma'ruf	Kecamatan Bojong Gede
28	Didin Wahidin	Kecamatan Tamansari
29	Yodi MS. Ermaya	Kecamatan Rancabungur
30	Yan Mulyana	Dinas Pertanian Kab. Bogor
31	Entis Sutisna	KIPP Bogor
32	Dadang Rusmana, Amd.	Dinas Pertanian Kab. Bogor

NO	NAMA	INSTANSI
33	Ir. Dodik Briawan, MCN.	IPB
34	Dr. Ir. Yayuk F. Baliwati, MS.	IPB
35	Ir. Gatoet Sroe Hardono	PSE
36	Iwan Fortuna Malonda	PKP BBKP Deptan
37	Ujas Supandi	Desa Cihideung Hilir, Kec. Ciampea
38	Koswara	Dinas Pertanian Kab. Bogor
39	Agus Setiadi	BIPP
40	Nurdjaman	BIPP
41	Wawan Ruhawan	Kecamatan Parung
42	Dace Supriadi	Kecamatan Citeureup
43	Bambang W. Tawakal	Kecamatan Cisarua
44	Teguh Purwanto	Kecamatan Bojong Gede
45	Dedi Sutendi	Kecamatan Kemang
46	Ugan Purnama	Desa Neglasari Kec. Dramaga
47	Rahmat Nugraha	Kecamatan Dramaga
48	Endang IB.	Desa Sukadamai
49	Agus Rejeki NN.	Dinas Bina Marga dan Pengairan
50	Phenty, STP.	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
51	Erita Yoeswar	PKK Kabupaten Bogor
52	Tini Idi Iskandar	PKK Kabupaten Bogor
53	Tuti Suparyo	PKK Kecamatan Bojong Gede
54	Tuti Setiawati	Kecamatan Tamansari
55	Endang Subekti	PKK Kecamatan Madang
56	E. Winarsih	Desa Cinangka Kec. Ciampea
57	Udin Junaedi	Desa Cinangka Kec. Ciampea
58	Yusuf Effendi	Kecamatan Pamijahan
59	Sofian	Kecamatan Jonggol
60	WR. Pelitawan, SH	Desa Leuwiliang
61	Abraham Faggidae	Ditjen Pemberdayaan Sosial, Depsos
62	Dr. Siane Nursianti Tanuwidjaja, MKM	Dinas Kesehatan Kab. Bogor
63	Dr. Budi Setiawan, MS	IPB
64	Ir. Ari Raharjo, MBA	Agrindo
65	Edy Rosyadi	Bapeda Kota Bekasi
66	Hafniwaty Supriadi	Kec. Citeureup
67	Sri Sunarsih Aditya	Kec. Parung Panjang
68	K. Suganda	Kec. Rumpin

NO	NAMA	INSTANSI
69	Saripudin	Dinas Pertanian Kab. Bogor
70	Rachmat Ismail	Dinas Pertanian Kab. Bogor
71	Daryana	Dinas Pertanian Kab. Bogor
72	Atin Supriatin	Dinas Pertanian Kab. Bogor
73	Utoro E. Santoso	Koperasi Agro Pasundan
74	Widiawati, AMG	Dinkes Kab. Cianjur
75	Ny. Hj. Harun H.	PKK Kabupaten Bogor
76	Ny. Endang Suharsini	Dinas Parsenbud Kab. Bogor
77	Dra. Surya Sumini	Dinas Parsenbud Kab. Bogor
78	Sarah Susanti	Kec. Pamijahan
79	Siti Maryati	Kec. Pamijahan
80	Yany T. Afandi	PKK Kec. Dramaga
81	Yani Darmawan	PKK Kec. Rumpin
82	Suprpto	Yayasan Arbangun
83	Hardoko	Teknologi Pangan Universita Pelita Harapan
84	S. Alina Tampubolon	DKP Ditjen PSKP
85	Aep Rokhmat	Dinas Ciptakarya
86	Hadi Purnama	Dinsos dan naker Kab. Bogor
87	Setiawan, SH	Kec. Parung Panjang
88	HE. Mulyadi, SH.	Kec. Cijeruk
89	Eddy Wardani, SH	Kec. Ciawi
90	Drs. Rosidin	Kec. Tenjo
91	Domon S. Suparman	Universitas Terbuka
92	Diding Kusmadi	Universitas Negeri Jakarta
93	Budi Pitoyo	Koperasi Wana Sejahtera
94	Nining Warningsih	Kec. Ciomas
95	Neneng Efendi	Kec. Ciomas
96	Ir. Kobarsih	BPP Ciomas
97	Iyang	Bapeda Kab. Bogor
98	E. Sukandar	Kec. Ciomas
99	Drs. H. Zainandi, MM	Kec. Klapanunggal
100	Drs. Adi Setyabekti	Kec. Megamendung
101	Yati Sujana	Kec. Megamendung
102	Drg. Aisyah Wan Granie, MSc.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bogor
103	Ir. Eddy S. Mudjajanto. MS	IPB
104	Ir. Meilla Dwi Andrestian	IPB

Lampiran

Ucapan Terima Kasih

**PANITIA DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI**

Mengucapkan Terima Kasih

Kepada

H. Agus Utara Effendi

Bupati Kabupaten Bogor

Prof. Dr. Ir. H. HRM Aman Wirakartakusumah MSc.

Rektor Institut Pertanian Bogor

Dr. Achmad Suryana

Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian

Prof. Dr. Soekirman

Kepala Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi – IPB

Ir. Karhi Sukartaatmadja

Presiden Direktur AGRINDO Aneka Consult

Dr. Ir. Hardinsyah

Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi – IPB

Dr. Joyo Winoto

Karo Pertanian, Kehutanan, Pengairan, BAPPENAS

Ir. Apriyanto MM

Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur

Ir. Jamil Azzaini

Direktur Pemberdayaan, Dompot Dhuafa Republika

Ir. Lalu Suryade

DPRD Kabupaten Bogor

Drs. H. Harun Heryana

Kepala Bappeda Kabupaten Bogor

Ir. Endang Supardi

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis

Dr. Yayuk F Baliwati MSc.

Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi – IPB

**PANITIA DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI**

Mengucapkan Terima Kasih

Kepada

PT MONAGRO KIMIA

**PANITIA DIALOG DAN LOKAKARYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
DI ERA OTONOMI**

Mengucapkan Terima Kasih

Kepada

PATNERSHIP FOR ECONOMIC GROWTH

USAID

